



**PENGARUH UPAH MINIMUM TINGKAT PENGANGGURAN
DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi**

Oleh

**ANGGA ALFANDY
NPM. 1715210071**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL-& SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DIKOTA MEDAN

NAMA : ANGGA ALFANDY
N.P.M : 1715210071
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan
TANGGAL KELULUSAN : 08 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Wahyu Indah Sari, S.E., M.Si.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Assoc. Prof. Dr. E Rusiadi, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Dr.E Bakhtiar Efendi, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANGGA ALFANDY
NPM : 1715210071
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH UPAH MINIMUM TINGKAT
PENGANGGURAN DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024

Yang membuat pernyataan



ANGGA ALFANDY

ABSTRAK

PENGARUH UPAH MINIMUM TINGKAT PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MEDAN

Oleh

ANGGA ALFANDY
NPM. 1715210071

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis linear berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan Ada pengaruh upah minum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010-2022. Ada pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010-2022. Ada pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010-2022. Ada pengaruh upah minum, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010-2022. Nilai *R-Square* diatas adalah sebesar 87,3 % hal ini berarti bahwa 87,3% variasi nilai pertumbuhan ekonomi yang bermasalah ditentukan oleh peran dari variasi Upah Minimum, tingkat pengangguran dan IPM dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 87,3% sedangkan sisanya 12,7% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Upah Minimum, Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF MINIMUM WAGE UNEMPLOYMENT RATE AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX ON THE ECONOMIC GROWTH OF MEDAN CITY

By

ANGGA ALFANDY
NPM. 1715210071

The aim of this research is to determine the effect of the minimum wage, poverty level and human development index on the economic growth of Medan City. This research uses a quantitative approach with multiple linear analysis techniques. The research results show that there is an influence of drinking wages on economic growth in Medan City in 2010-2022. There is an influence of the unemployment rate on economic growth in Medan City in 2010-2022. There is an influence of the human development index on economic growth in Medan City in 2010-2022. There is an influence of the minimum wage, unemployment rate and human development index on economic growth in Medan City in 2010-2022. The R-Square value above is 87.3%, this means that 87.3% of the variation in the value of economic growth which is determined by the role of variations in Minimum Wages, hunger levels and HDI in influencing economic growth is 87.3% while the remaining 12, 7% is influenced by other variables not included in this study.

Keywords: Minimum Wage, Unemployment Rate, Human Development Index, Economic Growth.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Skripsi ini disusun dengan harapan dapat menjadi referensi dan informasi bagi semua pihak. Skripsi ini merupakan upaya maksimal yang dapat penulis lakukan dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Dalam proses penyusunan laporan penelitian disertasi ini, penulis tidak bisa lepas dari berbagai kendala. Namun semua kendala tersebut dapat diatasi dengan bantuan berupa bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis pada kesempatan ini:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E Rusiadi, S.E., M.Si, CIQaR, CIQnR selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Wahyu Indah Sari, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak Dr. E Rusiadi, S.E., M.Si, CIQaR, CIQnR, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Bakhtiar Efendi, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Kepada seluruh Dosen dari Prodi Ekonomi Pembangunan, terima kasih tak terhingga atas segala ilmu yang baik dan bermanfaat bagi penulis.
7. Yang tercinta kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda Indratno dan Ibunda Elvidayani yang telah memberikan dorongan, nasehat, kasih sayang, doa yang tidak terbatas, serta dukungan material maupun spiritual.
8. Kepada seluruh teman seperjuangan terima kasih atas motivasi yang selalu mengalir dan pelajaran yang sangat berarti bagi penulis.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan juga para pembaca. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Mei 2024

ANGGA ALFANDY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Perumusan Masalah	8
D. Pembatasan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Pertumbuhan Ekonomi	11
a. pengertian Pertumbuhan Ekonomi	11
b. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi	12
2. Upah Minimum	18
a. Pengertian Upah	18
b. Komponen Upah	20
c. Jenis-Jenis Upah	21
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah	22
e. Tinjauan umum Mengenai Upah Minimum.....	26
3. Tingkat Pengangguran.....	29
a. Pengertian Tingkat Pengangguran.....	29
b. Jenis-Jenis Pengangguran	32
c. Dampak Pengangguran	33
d. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia	37
e. Teori Pembangunan Manusia (Human Capital Theory).....	38
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Hipotesis Penelitian	44
BAB 3 METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Penelitian	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	47
D. Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Hasil Penelitian	59
B. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA83	
A. Daftar Pustaka.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Upah Minimum dan PDRB Kota Medan	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	46
Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel	47
Tabel 4.1 Upah Minimum dan PDRB Kota Medan	59
Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	62
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	65
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	67
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linier Berganda	67
Tabel 4.6 Hasil Uji t (Parsial)	69
Tabel 4.7 Hasil Uji-F (Simultan)	72
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Uji Normalitas dari Normal P-P Plot Regression Standardized Residual	63
Gambar 4.2 Histogram	64
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	66
Gambar 4.4 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya mencerminkan peningkatan total pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah, melainkan juga menandakan peningkatan nilai tambah secara keseluruhan. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, penting untuk menggunakan harga riil, yang memperhitungkan inflasi dan perubahan harga. Tarigana (2016:46) menjelaskan bahwa pendapatan daerah mencerminkan imbalan yang diberikan kepada faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi yang aktif dalam wilayah tersebut, yang pada dasarnya mencerminkan kesejahteraan wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang terus bertambah setiap tahunnya, kebutuhan akan konsumsi pun meningkat. Oleh karena itu, tambahan pendapatan juga menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Tarigan (2016:14) menegaskan bahwa upah dan gaji merupakan sumber pendapatan utama bagi para pekerja, sehingga penetapan upah minimum menjadi esensial bagi pertumbuhan ekonomi. Kehadiran upah minimum bukan hanya berpengaruh pada pendapatan per kapita, tetapi juga memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian,

upah minimum bukan hanya merupakan elemen vital dalam aspek ekonomi, tetapi juga merupakan fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui PDRB, sementara analisis sektor dan subsektor juga memberikan gambaran yang penting. Analisis ini menjadi penanda keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, prediksi pertumbuhan ekonomi masa depan juga bisa didasarkan pada pendapatan serta peluang yang teridentifikasi dari data historis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sjafrijal (2017:70).

Tingkat pengangguran menjadi faktor krusial yang mempengaruhi PDRB di Kota Medan. Permasalahan ini rumit karena melibatkan interaksi beragam faktor yang saling mempengaruhi. Pengangguran yang tidak ditangani dengan cepat berpotensi menimbulkan kerawanan sosial serta kemungkinan meningkatnya tingkat kemiskinan (BPS, 2020). Pengangguran terus menjadi perhatian utama dalam ekonomi Indonesia. Dengan pertumbuhan penduduk yang konstan, jumlah pencari kerja juga terus bertambah. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk menangani masalah pengangguran ini demi kestabilan ekonomi dan sosial yang lebih baik.

Jumlah pengangguran adalah proporsi antara individu yang aktif mencari pekerjaan dengan total populasi angkatan kerja dalam suatu wilayah. Definisi pengangguran mengacu pada individu yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu (Sumarsono, 2014). Selain faktor upah minimum dan tingkat pengangguran, pembangunan manusia juga menjadi faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) menjadi alat pengukur yang

relevan dalam mengevaluasi kinerja pembangunan manusia suatu negara atau wilayah, yang mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Peran HDI dalam menilai kemajuan manusia secara holistik telah membuatnya menjadi salah satu indikator kunci dalam menganalisis perkembangan ekonomi dan sosial suatu daerah (BPS,2012).

Penilaian terhadap kualitas fisik dan non-fisik penduduk dapat dilakukan melalui Indeks Pembangunan Manusia, sebuah indikator yang kompleks yang mencakup tiga aspek pokok pembangunan manusia. Aspek-aspek tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kualitas fisik tercermin dalam angka harapan hidup, sementara kualitas non-fisik tercermin dalam rata-rata lama sekolah penduduk, tingkat melek huruf, dan peluang ekonomi seperti biaya riil per modal. Dengan Indonesia memiliki tiga puluh empat provinsi, gambaran pembangunan manusia di negara ini menjadi sangat beragam.

Indeks Pembangunan Manusia sendiri disusun dengan menggabungkan tiga komponen utama: angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Paritas Daya Beli. Pembangunan manusia merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia secara menyeluruh, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta memperhatikan kesehatan anggota keluarga dan lingkungannya.

Berikut ini upah minimum, tingkat pengangguran dan PDRB Kota Medan tahun 2010-2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Upah Minimum dan PDRB Kota Medan

Tahun	Upah Minimum (Rupiah)	Tingkat Pengangguran	Indek Pembangunan Manusia	PDRB Kota Medan (Milyar Rupiah)
2010	1 410 000	13,11	76,51	96,032
2011	1,439,258	9,97	77,12	98,576
2012	1,624,239	9,03	77,78	105,162
2013	1,777,382	10,01	78,00	110,795
2014	1,600,000	9,48	78,26	117,525
2015	2,037,000	11,00	78,87	124,269
2016	2,271,255	11,15	79,34	184,809
2017	2,528,815	9,46	79,98	203,035
2018	2,749,074	8,25	80,65	222,483
2019	2,969,824	8,53	80,97	241,482
2020	3,222,556	10,74	80,98	242,198
2021	3,329.867	6,33	81,21	254,721
2022	3.370.645	5,47	81,76	263,640
2023	3.624.117	5.24	82.61	264.300

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan, Diolah.

Setiap tahun, upah minimum Kota Medan mengalami kenaikan seiring dengan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja. Data yang terdokumentasikan menunjukkan fluktuasi angka pengangguran di Kota Medan, yang secara keseluruhan mengalami periode kenaikan dan penurunan. Penyebab utama dari tingginya tingkat pengangguran adalah pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan lapangan kerja yang tersedia. Tingkat pengangguran, sebagai indikator penting dalam ekonomi ketenagakerjaan, memberikan gambaran tentang seberapa baik pasar kerja dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia. Tingkat pengangguran yang tinggi memiliki potensi untuk menjadi akar masalah kemiskinan, yang selanjutnya dapat mengakibatkan peningkatan tingkat kejahatan dan menghambat proses pembangunan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penanganan masalah

pengangguran menjadi krusial dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Artriyan, 2013).

Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja/pegawai memiliki hak untuk menerima penghasilan yang memadai guna menunjang kehidupan yang bermartabat. Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin standar penghidupan yang layak, dengan memperhatikan faktor produktivitas dan perkembangan ekonomi, seperti yang disampaikan oleh Wijaya (2014:110). Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja/pegawai dalam rangka memastikan kesejahteraan mereka.

Dalam menetapkan upah minimum, pemerintah mengadakan evaluasi terhadap kebutuhan dasar hidup, pertumbuhan serta kelangsungan usaha, kondisi pasar tenaga kerja, indeks harga konsumen, perbedaan upah minimum antar wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita di setiap daerah. Semua faktor ini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran upah minimum di setiap wilayah. Ketidaksesuaian dalam penentuan upah minimum dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi di suatu daerah atau bahkan menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi yang dapat mempengaruhi proses produksi, konsumsi, dan distribusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat dalam menetapkan upah minimum sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Upah minimum yang tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja berpotensi memaksa perusahaan untuk menghadapi risiko bangkrut karena mereka tidak dapat menggaji pekerjanya secara layak. Dampaknya bukan

hanya pada stabilitas finansial perusahaan, tetapi juga dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar. PHK ini kemudian akan berdampak pada permintaan dan kelangkaan barang, menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya hidup, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tak terkendali.

Tidak adanya penegakan yang efektif terhadap peraturan upah minimum memperburuk situasi ini. Banyak pengusaha yang, meskipun telah ada peraturan yang jelas terkait upah minimum, masih enggan atau bahkan menolak mematuhi. Mereka cenderung menyalahgunakan sistem penggajian dengan memperhitungkan berbagai faktor yang tidak relevan, semata untuk memaksimalkan keuntungan mereka tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja.

Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang berujung pada kesengsaraan bagi banyak orang. Kesenjangan antara upah dan biaya hidup menimbulkan tekanan ekonomi yang besar bagi pekerja, sementara juga mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar. Hal ini dapat merugikan tidak hanya para pekerja yang terkena dampak langsung, tetapi juga seluruh ekosistem ekonomi negara tersebut.

Menurut Bambang (2013: 233-235), faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pengusaha/perusahaan dalam menetapkan sistem pengupahan meliputi kondisi perusahaan, tingkat keterampilan tenaga kerja, standar hidup, jenis pekerjaan, kekuatan serikat pekerja, efisiensi manajemen perusahaan, dan kekurangan tenaga kerja. Terlepas dari itu, Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha/perusahaan tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum yang

telah ditetapkan. Namun, Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang yang sama juga menyatakan bahwa pengusaha yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut dapat dihentikan kegiatannya.

Penangguhan tersebut sering digunakan oleh perusahaan/pengusaha sebagai alasan untuk menghindari kewajiban membayar upah minimum kepada karyawan/pekerja dengan alasan ketidakmampuan perusahaan. Sebagai tambahan, penelitian yang dilakukan oleh Askenazi (2016) menunjukkan bahwa adopsi upah minimum dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akumulasi sumber daya manusia. Dengan demikian, kesejahteraan yang dihasilkan dari penerapan upah minimum akan berkontribusi pada menciptakan lingkungan ekonomi yang kompetitif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk mengetahui apakah variasi upah minimum berpengaruh terhadap variasi pertumbuhan ekonomi, sehingga penulis memberikan judul penelitian ini sebagai berikut : **“Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hubungan kerja terdapat perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja, yang mampu memicu timbulnya konflik.
2. Terjadinya kenaikan dan penurunan tingkat pengangguran di Kota Medan.

3. Terdapat perbedaan persepsi antara pekerja dengan pengusaha terhadap upah, yang mana pengusaha cenderung menganggap upah sebagai biaya.
4. Meningkatnya indeks pembangunan manusia tidak diikuti dengan menurunnya jumlah tingak pengangguran pada beberapa tahun di Kota Medan
5. Dengan dalih ketidakmampuan, perusahaan mengajukan penangguhan untuk menghindari kewajibannya membayar upah pekerja sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka secara khusus permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan?
3. Apakah terdapat pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan?
4. Apakah terdapat pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan?

D. Pembatasan Masalah

Agar masalah lebih terfokus dan spesifik, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, melihat pembatasan masalah yang diangkat perlu

dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian untuk hanya membahas yang berkaitan dengan upah minimum, tingkat pengangguran dan indeks manusia membangun dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Karena pemberian upah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak pada masyarakat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik dari segi konsumsi maupun dari segi kesejahteraan masyarakat.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh antara upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan
4. Untuk mengetahui pengaruh simultan pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat memperdalam pengetahuan dan ilmu serta wawasan mengenai upah minimum agar penulis mengetahui lebih jelas bagaimana upah minimum

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau wilayah. Sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

2. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat dijadikan sebagai studi perbandingan dalam rangka mengkaji ilmu pengetahuan. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik lagi bagi sivitas akademik, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Sosial Sains Panca Budi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono (2016:36), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai parameter kuantitatif yang mencerminkan kemajuan perekonomian dalam suatu periode tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Arsyada (2015:214) menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga mencakup peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), terlepas dari apakah pertumbuhan tersebut melebihi atau kurang dari laju pertumbuhan penduduk, perubahan dalam struktur ekonomi, atau perbaikan sistem kelembagaan.

Sementara menurut Putong (2018:411), pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai peningkatan pendapatan nasional secara substansial, dengan fokus pada peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka waktu tertentu.

Konsep ini sejalan dengan pandangan Manik (2014:12), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai indikator utama kinerja ekonomi. Selain itu, tujuan PDB adalah untuk menggambarkan keseluruhan aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu dalam nilai dolar. Dua pendekatan utama dalam melihat PDB

adalah melihatnya sebagai total pendapatan per individu dalam ekonomi atau sebagai total pengeluaran untuk produksi barang dan jasa.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan aktivitas perekonomian yang tercermin dalam pertumbuhan PDB atau Produk Domestik Bruto dalam periode waktu yang panjang, tanpa memperhatikan faktor pertumbuhan populasi atau perubahan dalam struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara serta keberhasilan kebijakan ekonomi yang diterapkan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan haruslah seimbang dengan keberlanjutan lingkungan serta distribusi hasil yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat.

b. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ada beragam pandangan dari para ekonom mengenai fenomena pertumbuhan ekonomi yang telah menjadi bahan perdebatan selama bertahun-tahun. Sejumlah tokoh terkemuka telah menyumbangkan gagasan dan teori mereka terkait pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, menurut Sadono (2016:38), terdapat beragam teori yang membahas aspek-aspek pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami dan menganalisis fenomena tersebut, di antaranya :

1) Teori Pertumbuhan Klasik

Dalam evolusi pemikiran ekonomi, pengarang ekonomi pada periode kedua paruh abad ke-18 hingga awal abad ke-20 sering kali terklasifikasi sebagai klasik. Kelompok klasik itu sendiri terdiri dari

dua aliran, yaitu Klasik dan Neo-Klasik. Tokoh-tokoh yang mencuat dalam kelompok klasik termasuk Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Mereka memiliki variasi pandangan dalam menganalisis aspek pembangunan ekonomi.

Salah satu kontribusi penting adalah gagasan Adam Smith dalam karyanya "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". Dalam buku tersebut, Smith menggali alasan di balik kemajuan ekonomi suatu negara. Menurut pandangan Smith, kebijakan *laissez-faire* atau pasar bebas akan mengoptimalkan tingkat kemajuan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat.

Smith juga menyoroti faktor-faktor yang menentukan kemajuan pembangunan. Dia berpendapat bahwa pertumbuhan populasi akan merangsang perkembangan ekonomi. Lebih lanjut, dalam menggambarkan esensi dari proses pertumbuhan ekonomi, Smith menyatakan bahwa jika proses pembangunan telah dimulai, maka akan terus berkembang secara kumulatif.

Pandangan Ricardo dan Mill menentang pandangan Smith yang optimis terhadap proses pembangunan ekonomi, mereka justru lebih pesimis terhadap hasil akhirnya dalam jangka panjang. Menurut kedua ekonom klasik ini, pada akhirnya, perekonomian akan mencapai keadaan stasioner, dimana pertumbuhan ekonomi berhenti sama sekali.

Para ekonom klasik meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti populasi, modal tetap, luas tanah, sumber daya alam, dan tingkat teknologi. Namun, dalam

pandangan klasik ini, populasi dianggap sebagai faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mereka berargumen bahwa penurunan pendapatan akan menghambat pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bersifat kontinu.

Pendapat mereka menekankan bahwa ketika populasi rendah dan sumber daya alam melimpah, tingkat pengembalian modal dari investasi produktif akan tinggi. Hal ini akan mendorong peningkatan investasi baru dan, pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi. Namun, jika populasi tumbuh terlalu cepat, hal ini akan menurunkan produktivitas per kapita, menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

2) Teori Schumpeter

Menurut pandangan Schumpeter, peran wirausaha dalam perkembangan ekonomi sangatlah vital. Mereka dilihat sebagai agen yang tak henti-hentinya memperbaharui dan berinovasi dalam ranah ekonomi, menginisiasi investasi baru, memperkenalkan produk-produk inovatif, meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, merambah pasar baru, mengeksplorasi sumber daya baru, serta mendorong perubahan dalam struktur organisasi demi meningkatkan efektivitas operasional.

Dengan perspektif ini, Schumpeter menegaskan pentingnya peranan wirausaha dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Wirausahawan yang memiliki dorongan untuk berinovasi cenderung untuk mengambil pinjaman dan mengalokasikan dana dalam bentuk

investasi. Tindakan investasi semacam itu kemudian akan memacu aktivitas ekonomi secara keseluruhan, menyebabkan gelombang efek positif yang melibatkan peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan pasar.

3) Teori Harrod-Domar

Perspektif ini menitikberatkan pada pertumbuhan dari sudut pandang permintaan. Pertumbuhan ekonomi dianggap terjadi ketika pengeluaran agregat terus meningkat pada tingkat pertumbuhan yang telah ditetapkan, terutama melalui peningkatan investasi. Teori Harrod-Domar menguraikan beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai:

- a) Kapasitas penuh dari aset tetap telah tercapai.
- b) Tingkat tabungan sebanding dengan pendapatan nasional.
- c) Rasio modal-output tetap konstan.
- d) Struktur ekonomi terdiri dari dua sektor.

Analisis mereka menunjukkan bahwa meskipun pada suatu tahun aset tetap telah mencapai kapasitas penuhnya, pengeluaran kumulatif akan mengakibatkan peningkatan kapasitas aset tetap pada tahun berikutnya. Dengan kata lain, investasi yang dilakukan pada suatu tahun akan meningkatkan kapasitas aset tetap pada tahun atau periode selanjutnya. Hal ini menegaskan pentingnya investasi berkelanjutan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

4) Teori Neo-Klasik

Menurut teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Abramovit dan Solow, aspek penawaran menjadi fokus utama dalam memahami pertumbuhan ekonomi. Mereka menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi memegang peran kunci dalam menentukan laju pertumbuhan. Solow khususnya menyoroti bahwa kemajuan teknologi serta peningkatan keterampilan dan pengalaman tenaga kerja adalah faktor yang paling vital dalam mendorong perkembangan ekonomi, bukan semata-mata didorong oleh peningkatan modal atau jumlah tenaga kerja. Dengan kata lain, faktor-faktor ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang menempatkan inovasi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai poin kunci dalam strategi pembangunan ekonomi yang efektif.

5) Teori Keynes

Pandangan ekonomi yang revolusioner dan fundamental telah diajarkan oleh John Maynard Keynes melalui karya monumentalnya, "General Theory of Employment, Interest and Money", yang terbit pada tahun 1936. Keynes menegaskan bahwa tingkat aktivitas ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh pengeluaran agregat, termasuk pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Lebih dari sekadar menjabarkan teori, Keynes memperkenalkan fondasi bagi pemahaman modern tentang makroekonomi.

Dalam konteks analisis makroekonomi, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi suatu negara adalah krusial. Analisis ini membantu menjelaskan bagaimana pengeluaran agregat dan penawaran agregat memengaruhi tingkat aktivitas ekonomi serta pendapatan nasional dalam periode tertentu. Selain itu, analisis ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah dapat mengatasi tantangan ekonomi melalui kebijakan yang tepat.

Dalam kerangka perekonomian modern, komponen biaya agregat terbagi menjadi empat kelompok utama: pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara komponen-komponen ini, ekonom dapat mengembangkan strategi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengelola ketidakseimbangan yang mungkin timbul dalam perekonomian.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Modern

Menurut Rahardjo (2017:106), dalam konteks ekonomi modern, berbagai faktor memainkan peran penting dalam menentukan pertumbuhan. Para ahli ekonomi memandang faktor produksi sebagai kekuatan utama yang membentuk arah pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor produksi yang memiliki pengaruh signifikan, diantaranya :

- 1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam menjadi elemen krusial yang membentuk fondasi pertumbuhan ekonomi.
- 2) Proses Akumulasi Modal atau pembentukan modal adalah penambahan aset modal dalam periode tertentu, yang menjadi landasan bagi ekspansi ekonomi.
- 3) Peran Organisasi tak dapat diabaikan; keberadaannya mengkomplemen modal dan tenaga kerja, serta berkontribusi pada peningkatan produktivitas.
- 4) Perkembangan Teknologi menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi modern, membawa dampak positif pada produktivitas, modal, dan faktor produksi lainnya.
- 5) Strategi Pembagian Kerja dan Skala Produksi, bersama dengan konsep spesialisasi, tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mendorong terbentuknya industri manufaktur skala besar, yang pada gilirannya mempercepat perkembangan sektor industri secara keseluruhan.

2. Upah Minimum

a. Pengertian Upah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 "Tentang Ketenagakerjaan", upah merupakan hak yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima oleh pekerja atau buruh dari pengusaha atau pemberi kerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Definisi ini juga diperkuat oleh Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pengupahan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, serta mencakup tunjangan yang telah ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang jelas dalam hal upah, baik dalam konteks hubungan antara pekerja dan pengusaha maupun dalam memastikan hak-hak pekerja terjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, upah bukan hanya sekadar kompensasi finansial, tetapi juga merupakan bagian integral dari perlindungan dan pengakuan terhadap kontribusi pekerja dalam dunia kerja.

Gaji yang diterima oleh pegawai dari perusahaan tidak hanya sekadar penghargaan, melainkan juga sebuah kebutuhan yang adil dan sesuai sebagai penghargaan atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Konsep tentang upah bervariasi menurut berbagai ahli. Menurut Rivai (2015:351), upah bisa terbagi berdasarkan jam kerja, produk yang dihasilkan, atau jasa yang diberikan oleh karyawan. Selain itu, Muchdarsyah Sinungan (2016:90) menjelaskan bahwa upah juga mencerminkan pendapatan nasional, yaitu uang yang diterima oleh pekerja berdasarkan kuantitas dan kualitas kerja yang mereka lakukan untuk menghasilkan produk. Tidak hanya itu, Sadono (2016:351) memberikan perspektif bahwa upah adalah pembayaran atas jasa fisik yang diberikan oleh pekerja kepada pengusaha. Sementara menurut Malayu SP. Hasibuan (2017:133), upah merupakan imbalan yang dibayarkan kepada pekerja harian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Menggabungkan berbagai konsep ini, dapat disimpulkan bahwa gaji adalah bentuk imbalan yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang mereka berikan kepada perusahaan. Besarannya dapat ditentukan berdasarkan berbagai faktor seperti lamanya waktu kerja, jumlah produk yang dihasilkan, jenis jasa yang diberikan, dan kesepakatan yang telah disepakati antara karyawan dan perusahaan.

b. Komponen Upah

Berdasarkan SE-07/MEN/1990 Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Bukan Gaji, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Komponen upah terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, dan manfaat tidak tetap. Gaji pokok adalah imbalan dasar yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kontrak mereka. Sementara itu, tunjangan tetap merupakan pembayaran rutin yang diberikan kepada karyawan dan keluarganya terkait dengan pekerjaan, seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, dan tunjangan perumahan, yang dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok.

Manfaat tidak tetap adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja dan anggota keluarganya secara tidak teratur dan tidak bersamaan dengan gaji pokok. Namun, ada juga komponen pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori gaji, seperti fasilitas yang memberikan kesempatan bagi pegawai untuk menggunakan alasan khusus dalam bentuk nyata atau untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, bonus merupakan pembayaran tambahan yang diterima karyawan atas keuntungan perusahaan atau melebihi target produksi normal. Terakhir, tunjangan hari raya dan bagi

hasil lainnya juga merupakan pendapatan tambahan yang tidak termasuk dalam komponen gaji pokok. Hal ini penting untuk dipahami guna memastikan adanya perlindungan dan pengaturan yang sesuai bagi para pekerja dan perusahaan.

c. Jenis-Jenis Upah

Menurut G. Kartasapoetra (2018:100), variasi upah yang dapat ditemui meliputi :

1) Gaji nominal

Merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja sebagai imbalan atas kinerja jasa yang sesuai dengan syarat-syarat kontrak kerja. Di tempat kerja di mana gaji tidak tersedia, pemberian tambahan atau tunjangan lainnya dapat diberikan sebagai pengganti. Gaji nominal ini juga dikenal sebagai upah uang, karena diberikan dalam bentuk tunai.

2) Upah riil

Merupakan imbalan yang sesungguhnya diterima oleh pekerja, bergantung pada daya beli uang yang diterima dan biaya hidup yang harus dipenuhi. Kadang-kadang, upah bisa diterima dalam bentuk uang, barang, atau jasa, sehingga upah riil adalah hasil penjumlahan nilai uang dengan nilai benda atau jasa yang diterima.

3) Upah layak

Merujuk pada upah yang cukup bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih luas, termasuk kebutuhan dasar serta beberapa kebutuhan sosial seperti pendidikan yang berkualitas, pangan bergizi, kontribusi asuransi jiwa, dan lainnya.

4) Upah minimum

Pentingnya pendapatan yang diterima oleh karyawan di suatu perusahaan memperlihatkan perlunya penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan pekerja.

5) Upah yang adil

Upah yang seimbang sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh pekerja kepada pemberi kerja, sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati di antara keduanya.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Menurut Moekijat (2013:14), berbagai faktor memainkan peran penting dalam menentukan tingkat upah, yang meliputi :

1) Dinamika upah dalam sektor swasta

Kenaikan upah di sektor swasta cenderung mempengaruhi besaran upah secara keseluruhan, termasuk upah pegawai negeri.

2) Stabilitas keuangan negara

Keadaan keuangan yang tidak stabil dapat menghambat kenaikan upah karena kurangnya sumber daya yang tersedia.

3) Tingkat Biaya hidup

Biaya hidup yang tinggi akan mendorong peningkatan upah agar dapat mencukupi kebutuhan dasar pekerja.

4) Regulasi Pemerintah

Kebijakan pemerintah dapat membatasi kenaikan gaji melalui regulasi yang diberlakukan.

5) Kekayaan negara

Negara dengan perekonomian yang kuat lebih mungkin memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerja mereka.

6) Produktivitas tenaga kerja

Karyawan yang produktif layak untuk menerima upah yang sebanding dengan kontribusinya terhadap produktivitas perusahaan.

7) Pasokan tenaga kerja

Pasokan tenaga kerja yang terbatas dapat mendorong kenaikan upah karena permintaan yang tinggi.

8) Kondisi kerja

Pekerja yang bekerja dalam kondisi yang sulit atau berisiko mungkin berhak atas kompensasi yang lebih tinggi.

9) Durasi Kerja

Lama kerja yang melebihi standar dapat menjadi pertimbangan untuk menaikkan upah pekerja.

10) Geografis dan regionalisme

Perbedaan geografis dapat mempengaruhi tingkat upah berdasarkan perbedaan biaya hidup dan kebutuhan regional.

11) Dampak Inflasi

Inflasi dapat mereduksi daya beli upah, sehingga kebijakan perlu diimplementasikan untuk menjaga daya beli pekerja.

12) Pertumbuhan Pendapatan nasional

Kenaikan pendapatan nasional harus diikuti dengan peningkatan upah untuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang adil.

13) Keharmonisan dengan Harga pasar

Kenaikan harga barang dan jasa harus diimbangi dengan kenaikan upah agar tetap sesuai dengan daya beli.

14) Nilai sosial dan etika

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai sosial yang diinginkan oleh masyarakat.

Disilain menurut Mohammad Agus (2016:142), faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat upah meliputi:

1) Dinamika Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Tingkat upah cenderung dipengaruhi oleh keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan permintaan akan keterampilan tertentu. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi mungkin memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang lebih umum.

2) Peran Organisasi perburuh

Keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh dapat memperkuat posisi pekerja dalam menegosiasikan upah mereka, sehingga memengaruhi penentuan upah secara keseluruhan.

3) Kesehatan Finansial Perusahaan

Kesehatan finansial sebuah perusahaan juga turut mempengaruhi kemampuannya untuk membayar upah yang kompetitif. Kenaikan biaya produksi yang signifikan dapat berdampak negatif pada kemampuan perusahaan untuk membayar upah yang layak.

4) Produktivitas tenaga kerja

Tingkat produktivitas pegawai merupakan faktor penting dalam menentukan besaran upah yang diterima oleh individu. Kinerja yang tinggi cenderung dihargai dengan upah yang lebih besar.

5) Pengaruh Biaya hidup

Faktor geografis dan ekonomi, seperti tinggal di kota besar, dapat memengaruhi biaya hidup seseorang. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan dalam menentukan "batas gaji" yang dapat diterima oleh pekerja.

6) Peran regulasi Pemerintah

Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan standar upah minimum yang harus dipatuhi oleh perusahaan atau pemberi kerja. Kebijakan ini dapat memengaruhi tingkat upah secara keseluruhan di pasar kerja.

7) Konsistensi internal dan eksternal dalam struktur upah

Penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki struktur upah yang konsisten secara internal dan eksternal. Konsistensi internal berkaitan dengan keadilan dalam sistem penggajian di dalam perusahaan itu sendiri, sementara konsistensi eksternal melibatkan perbandingan dengan praktik upah di perusahaan sejenis.

e. Tinjauan umum Mengenai Upah Minimum

Menurut B-M/243/HL.01.00/XI/2023, definisi Upah Minimum yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas komponen upah pokok dan tunjangan tetap.

Sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Gaji yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2003, diamanatkan bahwa Gubernur berkewajiban menetapkan upah minimum tahunan setiap tahunnya. Proses penentuan upah minimum oleh Gubernur harus mempertimbangkan Komponen Harga Kebutuhan Layak (KHL) dengan memperhatikan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Peraturan pemerintah juga mengatur aspek-aspek seperti penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, dan perlindungan bagi pekerja serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai/pekerja.

Tujuan utama dari Upah Minimum adalah untuk mencapai Komponen Harga Kebutuhan Layak (KHL), yang mengacu pada standar kebutuhan hidup yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Penetapan Upah Minimum haruslah progresif, mengingat kebutuhan hidup minimum sangat bergantung pada kondisi dunia usaha. Upah minimum dapat diterapkan berdasarkan tahun atau wilayah, serta dapat dibedakan berdasarkan sektor dalam suatu wilayah negara bagian atau kabupaten/kota.

Selain itu, Upah Minimum sektoral dapat ditetapkan untuk sejumlah sektor usaha sesuai dengan klasifikasi bidang usaha Indonesia di tingkat kabupaten/kota, provinsi, multiprovinci, atau bahkan tingkat

nasional. Pentingnya memastikan bahwa upah minimum sektoral tidak lebih rendah dari upah minimum regional yang berlaku di wilayah terkait.

Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan beberapa aspek yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. B-M/243/HI.01.00/XI/2023. Pertimbangan dasar meliputi kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (CPI), faktor-faktor ekonomi seperti peluang, perkembangan, dan keberlanjutan perusahaan, serta upah yang berlaku umum di daerah dan antar daerah. Selain itu, kondisi pasar tenaga kerja, tingkat pembangunan ekonomi, dan pendapatan per kapita juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan.

Khusus untuk penentuan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK), perlu juga mempertimbangkan kapasitas sektoral perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penentuan upah minimum tidak hanya memenuhi kebutuhan pekerja, tetapi juga tidak memberikan beban yang berlebihan bagi perusahaan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada keberlanjutan usaha dan lapangan kerja (Abdul Hakim, 2016:42-43).

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini secara cermat, diharapkan penetapan upah minimum dapat menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan pekerja dan pengusaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia menyatakan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan

Upah Minimum akan dikenakan sanksi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan B-M/243/HL.01.00/. Namun, permohonan untuk menghentikan sementara penerapan Upah Minimum tidak dapat langsung disetujui oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dari Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Republik Indonesia B-M/243/HL.01.00/. Gubernur akan menetapkan keputusan terkait penolakan atau persetujuan penundaan penerapan Upah Minimum berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Jika permohonan penundaan penerapan upah minimum disetujui oleh Gubernur, maka kesepakatan tersebut akan berlaku selama maksimal 1 (satu) tahun.

Perusahaan yang tidak dapat memenuhi pembayaran upah minimum memiliki opsi untuk menghentikan operasinya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri Tenaga Kerja. Penundaan penerapan upah minimum untuk perusahaan yang tidak mampu bersaing dimaksudkan untuk memberikan pengecualian sementara dari kewajiban upah minimum yang berlaku. Setelah masa penangguhan berakhir, perusahaan tersebut diwajibkan untuk membayar upah minimum yang berlaku saat itu tanpa harus membayar selisih upah minimum yang berlaku selama masa penangguhan. Ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan agar dapat mempertahankan keberlangsungannya tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

1) Pengertian Upah Minimum Propinsi/Kabupaten/Kota

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi B-M/243/HI.01.00/XI/2023 mengenai standar fisik, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, serta Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang penetapan upah minimum, upah minimum provinsi merupakan jumlah upah yang berlaku di seluruh wilayah kabupaten atau kota dalam suatu provinsi. Besarnya upah minimum untuk setiap wilayah provinsi, kabupaten, atau kota tidak seragam karena adanya perbedaan dalam nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di masing-masing daerah. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam penentuan upah minimum antar wilayah, sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan biaya hidup setempat. Upah minimum tersebut menjadi landasan bagi pemberian upah kepada pekerja di sektor formal maupun informal, sehingga pengaturan upah minimum menjadi penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

3. Tingkat Pengangguran

a. Pengertian Tingkat Pengangguran

Pengangguran didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan, menunggu panggilan kembali setelah di-PHK, atau menunggu untuk memulai pekerjaan baru dalam periode empat minggu terakhir. Alasan terjadinya pengangguran menurut Afrida (2017:134) adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja. Pekerja yang berhasil mendapatkan

pekerjaan dapat dianggap sebagai pekerja, sedangkan yang tidak berhasil dapat digolongkan sebagai penganggur, dengan catatan mereka masih berusaha mencari pekerjaan. Meskipun istilah pengangguran dan penganggur memiliki makna serupa, namun ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi agar dapat diklasifikasikan sebagai pengangguran. Salah satunya adalah keterlibatan aktif dalam mencari pekerjaan, seperti yang dijelaskan oleh Setiawan (2020: 2), bahwa tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peluang kerja yang memadai dapat menyebabkan pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja di pasar kerja melebihi permintaan, yang mengakibatkan kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Dalam konteks ilmu kependudukan, orang yang sedang mencari pekerjaan termasuk dalam kategori angkatan kerja.

Angkatan kerja umumnya terdiri dari individu berusia antara 15 hingga 64 tahun, namun tidak semua orang dalam rentang usia ini dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja. Hanya mereka yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini. Tingkat pengangguran mengacu pada persentase orang dalam angkatan kerja yang tidak berhasil memperoleh pekerjaan, mencerminkan kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja yang relevan. Ini adalah indikator penting dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara dan memahami dinamika ketenagakerjaan dalam suatu populasi (Rahardja, 2018: 376).

Menurut definisi yang diberikan oleh Nanga (2018: 253), pengangguran merujuk pada situasi di mana individu yang masuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tengah mencari pekerjaan. Selain itu,

pengangguran juga mencakup individu yang telah berhenti bekerja selama empat minggu terakhir dan sedang dalam proses pencarian pekerjaan baru, menanti panggilan kembali setelah pengalaman pemutusan hubungan kerja (PHK), atau menunggu kesempatan pekerjaan yang baru dalam periode empat minggu tersebut. Dalam konteks ini, pengangguran bukan hanya menggambarkan keadaan ketidakmampuan untuk bekerja, tetapi juga mencerminkan upaya aktif individu untuk memasuki pasar tenaga kerja (Sandy Dharmakusuma, 2016: 45).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afrida pada tahun 2018 (halaman 134), mayoritas individu meyakini bahwa ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja menjadi faktor utama penyebab pengangguran. Pengangguran terjadi ketika individu yang mencari pekerjaan berhasil ditempatkan (dipekerjakan), sementara yang lainnya yang gagal atau tidak berhasil mendapat pekerjaan dianggap sebagai penganggur, dengan catatan bahwa mereka masih aktif dalam mencari pekerjaan. Pengertian pengangguran merupakan hasil terjemahan dari istilah *unemployment*, namun dalam konteks tertentu, haruslah memenuhi syarat-syarat khusus agar dapat diklasifikasikan sebagai pengangguran. Salah satu syaratnya adalah keterlibatan aktif dalam mencari pekerjaan agar meningkatkan peluang untuk ditempatkan.

Setiawan (2018: 2), situasi pengangguran dapat timbul akibat laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, tanpa didampingi dengan kesempatan kerja yang memadai, serta penyerapan angkatan kerja yang cenderung menurun. Hal ini seringkali disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan lapangan kerja yang mampu menampung angkatan kerja yang siap bekerja. Dengan kata lain, jumlah pencari kerja di pasar tenaga kerja melebihi permintaan tenaga kerja yang ada.

Dalam ilmu demografi, individu yang sedang mencari pekerjaan termasuk dalam kategori populasi yang disebut sebagai angkatan kerja. Rentang usia angkatan kerja biasanya antara 15 hingga 64 tahun, meskipun tidak semua individu dalam rentang usia tersebut dianggap sebagai angkatan kerja. Hanya individu yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan yang dihitung sebagai angkatan kerja. Tingkat pengangguran mencerminkan persentase dari angkatan kerja yang tidak berhasil atau tidak mampu memperoleh pekerjaan. (Rahardja, 2018: 376).

b. Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sadono (2014:328), terdapat dua pendekatan dalam mengelompokkan jenis-jenis pengangguran, yakni melalui identifikasi sumber/penyebab pengangguran dan karakteristiknya. Jenis-jenis pengangguran yang muncul berdasarkan penyebabnya meliputi .

- 1) Pengangguran Normal atau Friksional, merupakan situasi di mana individu yang menganggur berusaha mencari peluang pekerjaan yang lebih memuaskan.
- 2) Pengangguran siklis, terjadi saat aktivitas ekonomi menurun atau ketika permintaan agregat lebih rendah daripada penawaran agregat dalam perekonomian.
- 3) Pengangguran struktural, timbul akibat perubahan dalam struktur kegiatan ekonomi yang dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara keterampilan pekerja dan permintaan pasar.
- 4) Pengangguran teknologi, terjadi ketika manusia digantikan oleh mesin atau teknologi dalam proses produksi, mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berkurang.

Kondisi-kondisi ini mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan mendorong perlunya kebijakan yang tepat dalam mengatasi setiap jenis pengangguran tersebut.

Menurut Sadono (2014:330), jenis-jenis pengangguran dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya :

- 1) Pengangguran terbuka terjadi ketika lapangan kerja tidak cukup untuk menampung pertumbuhan angkatan kerja.
- 2) Pengangguran tersembunyi muncul karena ada lebih banyak tenaga kerja daripada permintaan yang sebenarnya.
- 3) Pengangguran musiman biasanya terjadi di sektor pertanian dan perikanan sebagai akibat dari perubahan musim.
- 4) Pengangguran paruh waktu terjadi saat pekerja hanya bekerja sebagian waktu dan jam kerja mereka lebih rendah dari standar biasanya.

Penting untuk memahami berbagai jenis pengangguran ini karena setiap jenis memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda untuk mengurangi dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat.

c. Dampak Pengangguran

Menurut Sadono (2014: 330) dampak pengangguran meliputi:

- 1) Dampak pengangguran terhadap perekonomian

Pengangguran berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi potensi pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan maksimal yang seharusnya dapat mereka capai. Selain itu, dampak lainnya

dari pengangguran adalah menurunnya penerimaan pajak negara karena rendahnya aktivitas ekonomi. Penurunan penerimaan ini mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan layanan publik. Di sisi lain, pengangguran juga tidak merangsang pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, pengangguran pekerja seringkali menandai adanya kapasitas mesin perusahaan yang tidak terpakai sepenuhnya, mengurangi insentif perusahaan untuk melakukan investasi masa depan. Selain itu, pengangguran akibat perlambatan aktivitas perusahaan juga mengurangi keuntungan perusahaan, yang pada gilirannya mengurangi dorongan perusahaan untuk berinvestasi. Dengan demikian, dampak pengangguran ini jelas tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

2) Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran tidak hanya mengancam pendapatan dan kehidupan individu, tetapi juga berpotensi menghancurkan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Di negara maju, sistem asuransi pengangguran memberikan bantuan keuangan kepada para pengangguran, yang memungkinkan mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Namun, di negara-negara berkembang, ketiadaan program asuransi serupa menyebabkan para pengangguran harus bergantung pada tabungan atau bantuan dari keluarga dan teman untuk bertahan hidup, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam kehidupan keluarga.

Situasi pengangguran juga membawa konsekuensi yang lebih dalam, seperti penurunan keterampilan kerja. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu hanya dapat dipertahankan melalui praktek yang teratur. Namun, pengangguran jangka panjang mengakibatkan terhentinya pelatihan dan praktik, yang pada akhirnya mengurangi tingkat keterampilan kerja individu.

Lebih dari itu, pengangguran juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik yang serius. Ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap gagal mengatasi masalah pengangguran dapat memicu protes dan ketegangan di masyarakat. Selain itu, tingkat kejahatan seperti pencurian dan perampokan cenderung meningkat karena kesempatan kerja yang minim mendorong individu untuk mencari cara alternatif untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan proaktif dalam mengatasi masalah pengangguran untuk mencegah potensi konsekuensi negatif yang lebih luas.

4. Indeks Pembangunan Manusia

a. Pengertian Pembangunan Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi landasan utama dalam menggerakkan pembangunan. Dalam banyak negara berkembang, terutama yang menghadapi tantangan tingginya tingkat pertumbuhan, kesenjangan sosial, dan kemiskinan yang meningkat, pembangunan manusia menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, kebijakan publik yang fokus pada pengembangan sumber daya

manusia menjadi sangat penting. Sebagai subjek dan objek pembangunan, manusia harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintah. Investasi dalam pembangunan manusia bukan hanya memberikan dampak positif secara sosial, tetapi juga berperan sebagai modal tak langsung untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperkuat pembangunan manusia, diharapkan akan tercipta kondisi yang mendukung bagi masyarakat di berbagai sektor, sehingga menciptakan kesejahteraan nasional yang menjadi tujuan utama pembangunan.

Pentingnya memusatkan perhatian pada pembangunan manusia telah ditekankan oleh UNDP (1995: 118). Salah satu aspek yang ditekankan adalah pengutamaan penduduk sebagai pusat perhatian pembangunan. Selain itu, pembangunan harus memperluas pilihan penduduk, bukan hanya meningkatkan pendapatan semata. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kependudukan secara keseluruhan. Pembangunan manusia juga tidak hanya menekankan peningkatan kemampuan individu, melainkan juga optimalisasi pemanfaatan kemampuan tersebut.

Menurut BPS (2014: 65), Pembangunan Manusia adalah model pembangunan yang berupaya memperluas pilihan-pilihan yang dapat diusahakan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan penduduk dalam konteks pembangunan dicapai melalui peningkatan kemampuan dasar manusia, seperti kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga

mereka dapat memanfaatkannya secara optimal. Ini mencakup peningkatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial, dan politik.

Menurut Mazumdar (2011: 5), pembangunan manusia adalah fenomena multidimensi yang bergantung pada berbagai aspek kehidupan yang tidak dapat diukur secara otoritatif. Sementara menurut Mulyadi S (2014: 101), pembangunan manusia merupakan konsep yang relatif dan memerlukan pemahaman lintas disiplin ilmu. Dengan demikian, pembangunan manusia menuntut pendekatan yang komprehensif dan beragam, yang memperhitungkan berbagai aspek kehidupan manusia dari sudut pandang yang berbeda.

b. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

IPM atau HDI yang dikembangkan oleh Program Pembangunan PBB menyediakan pengukuran holistik bagi kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Indeks ini, diperkenalkan pada tahun 1990 oleh peraih Nobel Amartya Sen dan Mahbub ul Haq dari India, dibuat untuk mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan tingkat perkembangan mereka. Bukan hanya sekadar mengukur kemakmuran berdasarkan pendapatan per kapita, HDI memberikan gambaran yang lebih luas tentang kondisi masyarakat. Hal ini membantu dalam menilai dampak kebijakan ekonomi dan sosial terhadap kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, HDI juga menjadi alat penting bagi peneliti yang ingin mengakses informasi lebih detail dalam penyusunan laporan pembangunan

manusia. Dengan fokus pada aspek-aspek yang lebih sensitif dan berguna, seperti akses pendidikan dan kesehatan, HDI memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang kondisi sosial dan ekonomi suatu negara. Melalui nilai-nilai yang diberikan, HDI mencerminkan seberapa baik suatu negara mencapai tujuan pembangunan manusia yang ditetapkan, termasuk harapan hidup yang tinggi, akses pendidikan yang merata, dan standar hidup yang layak bagi semua warganya.

Oleh karena itu, semakin mendekati nilai 100, semakin baik pula pencapaian tujuan-tujuan tersebut, menandakan kemajuan yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, HDI tidak hanya memberikan pandangan tentang kemakmuran materi, tetapi juga tentang kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

c. Teori Pembangunan Manusia (Human Capital Theory)

Ada dua elemen pokok dalam modal manusia yang dapat diperhatikan dari segi bahasanya, yaitu modal manusia dan modal produksi. Modal merujuk pada faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan barang atau jasa tanpa dikonsumsi dalam prosesnya. Selain manusia, mesin dan teknologi juga termasuk dalam pengertian modal ini. Dalam konteks ekonomi, masyarakat memiliki peran serta tanggung jawab dalam berbagai kegiatan seperti produksi, konsumsi, dan operasi. Seiring dengan perkembangan teori ini, konsep modal manusia dapat dibagi menjadi tiga aspek. Pertama, human capital sebagai dimensi individu, yang menggambarkan modal manusia sebagai kumpulan kemampuan yang dimiliki oleh individu, seperti pengetahuan dan keterampilan.

Menurut Rastogi (2002), modal manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, kesehatan, dan karakteristik individu. Konsep kedua menegaskan bahwa modal manusia merupakan hasil dari pendidikan, seperti yang diperoleh melalui sekolah, kursus, dan pelatihan. Pandangan dasar dari konsep ini adalah bahwa modal manusia diperoleh melalui akumulasi proses tertentu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Alan dkk (2008). Mereka menyiratkan bahwa modal manusia tidak hanya diperoleh dari pengalaman semata. Konsep ketiga melihat sumber daya manusia dari sudut pandang produksi. Menurut Romer (1999), modal manusia adalah sumber utama produktivitas dalam perekonomian. Masyarakat melakukan investasi dalam sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini menunjukkan bahwa pengembangan modal manusia adalah langkah investasi yang krusial bagi kemajuan ekonomi suatu negara. (Rosen, 1999).

Menurut Frank & Bemanke (2007), modal manusia merupakan hasil akumulasi dari berbagai faktor seperti pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi, dan inisiatif yang secara signifikan memengaruhi produktivitas individu. Ada dua pendekatan utama dalam memperoleh modal manusia ini. Pertama, jumlah populasi yang berkualitas menjadi faktor penentu dalam keberhasilan suatu tenaga kerja, di mana semakin banyak jumlah tenaga kerja maka akan semakin meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kedua, investasi menjadi landasan utama dalam meningkatkan atau memperoleh sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan

memungkinkan pengembangan kemampuan dan keterampilan individu yang kemudian berdampak pada peningkatan produktivitas secara signifikan.

Todaro (2002) menyatakan bahwa modal manusia dapat diukur dari aspek pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tambah yang besar bagi individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pelatihan seseorang, semakin besar pula kemampuan dan keterampilannya. Kesehatan juga memegang peran penting dalam keseimbangan ini. Tanpa kesehatan yang memadai, potensi produktivitas dari pendidikan tinggi tidak dapat diwujudkan. Sebaliknya, pendidikan tinggi juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan individu. Oleh karena itu, pendidikan, kesehatan, dan investasi dalam pengembangan modal manusia merupakan aspek-aspek krusial dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan.

d. Komponen Penyusunan IPM

1) Usia Hidup

Angka harapan hidup diukur dengan memperhitungkan rata-rata jumlah kelahiran hidup per perempuan usia 15-49 tahun dalam lima kelompok umur, serta rata-rata jumlah anak yang masih hidup. Pembatas atas indeks harapan hidup adalah 85 tahun, sedangkan pembatas bawahnya adalah 25 tahun. Metode ini secara tidak langsung menggambarkan ekspektasi masa depan individu dalam masyarakat.

2) Pengetahuan

Sementara untuk mengukur tingkat pengetahuan penduduk, digunakan dua indikator utama, yaitu tahun pendidikan menengah yang dihabiskan individu pada usia 15 tahun dan tingkat melek huruf. Lama pendidikan menengah mencerminkan durasi pendidikan formal yang diterima individu, sementara tingkat melek huruf mengindikasikan kemampuan membaca dan menulis. Dalam proses perhitungan, kedua indikator tersebut digabungkan dengan bobot tertentu, dimana lama pendidikan menengah diberi bobot sepertiga dan tingkat melek huruf diberi bobot dua pertiga. Indeks pengetahuan diukur dengan batas maksimum 100, menunjukkan semua penduduk mampu membaca dan menulis, sementara nol menggambarkan sebaliknya, bahwa tidak ada penduduk yang memiliki kemampuan tersebut. Dengan demikian, tingkat pengetahuan penduduk dapat memberikan gambaran tentang kemampuan dan akses mereka terhadap pendidikan formal dan literasi.

3) Standar Hidup Layak

Indikator untuk menilai standar hidup yang layak bisa memanfaatkan PDB riil per kapita atau rata-rata pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Pembangunan manusia, konsep yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengukur kinerja pembangunan manusia dalam skala 0,0 hingga 100,0. Berdasarkan kategori yang ditetapkan, pembagian tersebut terdiri atas:

1. Tinggi: IPM di atas 80,0

2. Rata-rata Sedang: IPM antara 66,0 hingga 79,9
3. Rendah Rata-rata: IPM di kisaran 50,0 hingga 75,9
4. Rendah: IPM kurang dari 50,0

Jika status pembangunan manusia masih berada pada tolok ukur rendah, itu menandakan bahwa indikator-indikator pembangunan manusia di suatu wilayah membutuhkan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggalan. Sebaliknya, bila status pembangunan manusia masih berada pada level rata-rata, itu mengindikasikan perlunya peningkatan dalam pembangunan manusia.

Apabila suatu daerah memiliki status pembangunan manusia yang tinggi, itu menunjukkan bahwa indikator pembangunan manusia di daerah tersebut sudah baik atau optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menjaga agar kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut lebih produktif dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai landasan untuk mengarahkan jalannya penelitian yang sedang dilakukan. Informasi yang diperoleh dari penelitian terdahulu berperan penting dalam merumuskan kerangka konseptual, mengelola data, serta memberikan pemahaman mendalam tentang objek penelitian. Dengan memanfaatkan temuan-temuan sebelumnya, peneliti dapat mengeksplorasi lebih lanjut aspek-aspek yang belum terungkap atau

memperkuat hasil yang telah ada. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga dapat memberikan konfirmasi atau pun tantangan terhadap temuan yang dihasilkan oleh penelitian yang sedang berlangsung. Dengan demikian, kolaborasi antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menjadi sebuah prasyarat yang esensial dalam memajukan pengetahuan dan pemahaman di berbagai bidang ilmu.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Yulia Adella Sari Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah, 2021	Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dengan data berkala (time series). Sedangkan metode yang digunakan mengacu pada metode kuantitatif melalui analisis linier berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS) menggunakan SPSS 25.0 for Windows. Melalui tahapan penelitian tersebut diperoleh jawaban bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan.	Lokasi penelitian, menggunakan sampel non-probability sampling, menggunakan data PDRB dan upah minimum.

		Kemiskinan di Jawa Tengah.	
2	Ninda Novia Charysa, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008- 2011, 2013	Lokasi penelitian dan tahun penelitian. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dan upah sebagai variabel dependen, penelitian ini menggunakan upah sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen	Menggunakan data panel yaitu gabungan time series dan cross section., Menggunakan data PDRB dan upah minimu
3.	Rini Sulistiawati, Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Di Indonesia, 2012	Lokasi dan tahun penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana.	Lokasi dan tahun penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana.

C. Hioptesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:203), asal usul kata hipotesis velodu terletak pada asosiasi "hipo" yang menggambarkan kelemahan dan "tesis" yang menandakan keberatan. Sehingga, hipotesis digambarkan sebagai pernyataan yang relatif lemah karena masih dalam ranah spekulasi yang belum terverifikasi. Dengan demikian, hipotesis merupakan jawaban khusus yang hendak disampaikan melalui sebuah penelitian. Pengujian hipotesis menjadi langkah yang krusial dalam mencatat ataupun memaparkan hipotesis tersebut secara tepat. Untuk mempermudah pemilihan dan analisis, diperlukan penyusunan hipotesis alternatif, dikenal sebagai H_a , yang menyatakan suatu pernyataan dalam bentuk

positif. Sementara itu, H_0 , yang dinyatakan dalam bentuk negatif, memuat pernyataan yang menolak atau mengabaikan suatu asumsi yang diajukan. Dalam konteks ini, H_a mengarah pada hipotesis positif sementara H_0 menyatakan hipotesis negatif.

Adapun dugaan sementara dalam penelitian ini adalah :

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

H_a : Terdapat pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Medan.

H_a : Terdapat pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

3. H_0 : Tidak terdapat pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Medan.

H_a : Terdapat pengaruh upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

4. H_0 : Tidak terdapat pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Medan.

H_a : Terdapat pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami keterkaitan antara variabel-variabel yang ada. Pendekatan ini fokus pada analisis yang mengukur sejauh mana suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait hubungan sebab-akibat antara variabel penelitian dan hipotesis yang diuji. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi, membantu memperkaya pemahaman tentang fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2015).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

- 1) Penelitian ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik Kota Medan

2. Waktu Penelitian

- 2) Penelitian ini direncanakan pada Maret 2022 sampai dengan Selesai

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset												
2	Pengajuan Judul												
3	Bimbingan Proposal												

	upah minimum tidak sama setiap provinsi, kabupaten atau kota, karena bergantung pada nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) di daerah masing-masing.	ditetapkan Menaker (Menteri Tenaga Kerja).	
Tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan seberapa banyak angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan. Disini yang dimaksud dengan pengangguran adalah aktif mencari pekerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Kelamin 2. Pendidikan 3. Usia Kerja 	Rasio
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen utama kualitas hidup. Melalui pendekatan dasar tiga dimensi yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Angka harapan hidup saat lahir digunakan untuk mengukur kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka harapan Hidup 2. Angka Melek Huruf 3. Rata-rata Lama Sekolah 4. Daya Beli 	Rasio

Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Peningkatan total pendapatan masyarakat yang terjadi pada wilayah yaitu seluruh nilai tambah yang terjadi.	PDRB	Rasio
-------------------------------	---	------	-------

D. Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

Dalam konteks penelitian, populasi merupakan kumpulan semua laporan statistik yang diterbitkan oleh BPS Kota Medan dari tahun 2010 hingga 2022. Populasi ini mencakup beragam data dan informasi yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan demografi Kota Medan selama periode tersebut. Penelitian ini akan mengambil sampel dari populasi tersebut untuk menganalisis tren dan pola yang mungkin terjadi dalam data yang tersedia. Dengan demikian, populasi menjadi fokus utama dalam upaya memahami dinamika perkembangan Kota Medan selama beberapa tahun terakhir (Sugiyono, 2012).

2. Sampel

Menurut (Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, 2014) Penelitian ini memanfaatkan metode purposive sampling untuk memilih sampel yang dianggap mewakili populasi. Pendekatan ini secara khusus mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, baik dalam penilaian ahli maupun evaluasi ilmiah. Dengan demikian, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan BPS 13 tahun Kota Medan, sebagai representasi dari populasi yang relevan. Metode purposive sampling memberikan keleluasaan untuk

memilih sampel yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga hasilnya dapat memiliki signifikansi yang lebih tinggi dalam menggambarkan fenomena yang diamati.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder, yang merujuk pada informasi yang telah diolah dari sumber-sumber asli untuk keperluan analisis. Data sekunder menjadi landasan utama dalam menyusun laporan ini, sebagaimana data sekunder sering kali berupa data kuantitatif yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan dan analisis berbasis angka. Sumber data yang dipilih dalam penelitian ini adalah serangkaian laporan BPS Kota Medan dari tahun 2010 hingga 2022. Laporan-laporan ini menjadi penting karena mencakup rentang waktu yang relevan untuk memahami perkembangan dan dinamika yang terjadi di Kota Medan selama periode tersebut. Dengan demikian, melalui analisis data sekunder ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola dan tren-tren yang signifikan untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

3) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang artinya menghitung angka-angka kemudian menguji dan menganalisis data dengan menurunkan hasil pengujian dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis klasik bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan untuk penelitian merupakan model yang terbaik, jika

model tersebut merupakan model yang baik maka hasil analisis regresi tersebut layak dijadikan rekomendasi untuk tujuan pengetahuan atau pemecahan masalah praktis (Juliandi et al., 2014a).

Ada beberapa pengujian asumsi klasik yaitu:

a. Uji Normalitas

Untuk melihat apakah variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak diperlukan uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan untuk memeriksa apakah variabel terikat dan bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal (Juliandi, 2014).

Uji ini berguna untuk menilai kesesuaian model regresi dengan asumsi normalitas, dengan syarat bahwa data harus menunjukkan pola distribusi yang mengikuti garis diagonal dan tersebar merata di sekitar garis tersebut.

- a) Jika data terdistribusi merata di sekitar garis diagonal dan mengikuti pola garis tersebut, atau jika plot histogram menunjukkan distribusi yang normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Namun, jika data tersebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti pola garis diagonal, atau jika plot histogram menunjukkan pola sebaran yang tidak normal, maka model regresi dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas klasik. Dalam kasus ini, penyesuaian atau transformasi data mungkin diperlukan sebelum analisis regresi lanjutan dilakukan untuk mengatasi pelanggaran asumsi tersebut (Ghozali, 2016).

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas mengakibatkan koefisien dalam model menjadi tidak efektif dalam kemampuan prediksinya dan tidak masuk akal. Analisis regresi mensyaratkan varian setiap item gangguan menunjukkan kondisi stasioner, besarnya sama dengan deviasi kuadrat, dan mengasumsikan homoskedastisitas (Sopiah & Sangadji, 2010, hal 249).

Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan dalam varian residu di antara berbagai observasi dalam suatu model regresi. Salah satu metode yang sering digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah metode informal atau metode scatterplot. Pada dasarnya, untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, perhatian diberikan pada pola plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residu (SRESID). Hasil analisis menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS dapat memberikan indikasi bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi ketika titik-titik pada model regresi tersebar secara acak di sepanjang garis O pada sumbu Y. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk menentukan heteroskedastisitas meliputi berbagai pertimbangan analitis serta penggunaan alat statistik yang relevan, diantaranya :

- 1) Heteroskedastisitas terjadi jika terdapat pola tertentu, misalnya titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang mengembang, kemudian berkontraksi).

- 2) Jika tidak terdapat pola yang jelas pada sumbunya, misalnya titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Hal yang perlu dipertimbangkan adalah menghindari terjadinya korelasi yang sangat kuat antara variabel penjelas dalam model. Hal ini bisa menyebabkan masalah seperti multikolinearitas, yang terjadi ketika terdapat hubungan yang tinggi antara beberapa atau seluruh variabel penjelas. Dengan memastikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak berkorelasi secara sempurna, kita dapat mengurangi risiko distorsi dalam analisis dan memperoleh hasil yang lebih dapat diandalkan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengevaluasi dan mengatasi korelasi yang terlalu kuat perlu diimplementasikan dalam proses pemodelan. Metode seperti analisis korelasi dan teknik pengurangan dimensi dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menangani masalah ini secara efektif (Sopiah & Sangadji, 2010, hal 249).

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model. Keputusan mengenai adanya multikolinearitas didasarkan pada berbagai faktor dan metode statistik yang digunakan.

- 1) Jika nilai VIF (*Variance Inflation Fator*) > 10 dan nilai *tolerance* $< 0,1$ maka akan terjadi masalah multikolinearitas.
- 2) Jika VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terjadi masalah multikolinearitas.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi untuk menyelidiki cara di mana variabel atau kriteria yang terikat dapat diprediksi oleh variabel bebas atau prediktor individu (Sugiyono, 2018). Pendekatan regresi ini memberikan pemahaman mendalam tentang seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta kemampuannya untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen yang telah ditetapkan. Metode analisis regresi yang diterapkan dalam studi ini adalah regresi linier berganda, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak simultan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, analisis regresi linier berganda menjadi alat yang kuat untuk memahami hubungan antar variabel dan meramalkan hasil yang mungkin terjadi dalam suatu konteks penelitian.

4)

5)

6)

7)

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + e$$

8) Keterangan :

9)

10) Y = Pertumbuhan Ekonomi

11) a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

12) b = Angka arah koefisien regresi

13) X1 = Upah Minimum

14) X2 = Tingkat Pengangguran

15) e = Error / kesalahan

16)

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$)”.

Untuk menguji hipotesis yang dirumuskan, maka digunakan rumus uji-t dengan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t : harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standart deviasi dari distribusi t (table)

r : Koefisien korelasi xy yang ditemukan

n : Jumlah responden

Dengan rumus r sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}} \quad (\text{Sugiyono, 2011})$$

Keterangan :

n = banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x_i$ = jumlah pengamatan variabel x

$\sum y_i$ = jumlah pengamatan variabel y

$(\sum x_i^2)$ = jumlah kuadrat pengamatan variabel x

$(\sum y_i^2)$ = jumlah pengamatan variabel y

$(\sum x_i)^2$ = kuadrat jumlah pengamatan variabel x

$(\sum y_i)^2$ = pengamatan jumlah variabel y

$\sum x_i y_i$ = jumlah hasil kali variabel x dan y

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi signifikan, yang mengindikasikan bahwa secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) apabila nilai signifikansi melebihi 0,05, hipotesis akan ditolak, menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan, yang berarti secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Penting untuk memperhatikan bahwa nilai signifikansi adalah tolak ukur penting dalam menentukan kebermaknaan hasil analisis regresi dan implikasinya dalam menginterpretasi hubungan antarvariabel.

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat kemampuan keseluruhan variabel-variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah semua variabel mempunyai hubungan secara simultan dengan variabel dependen atau apakah koefisien regresinya sama dengan nol.

Rumus uji F adalah sebagai berikut:

$$Fh = \frac{\frac{R^2}{k}}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Sumber: (Sugiyono, 2016)

Keterangan :

Fh = Nilai F hitung

R² = Koefisien Korelasi ganda

k = jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Kriteria Pengambilan Keputusan

$F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima. Artinya variable bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

$F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Artinya variable bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Kriteria Bentuk Pengujian

H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

4. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Dalam konteks ini, R^2 mengukur seberapa baik model statistik dapat memprediksi perilaku variabel dependen berdasarkan variabel independen yang ada. Rentang nilai R^2 berada antara 0 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan hampir seluruh variasi yang terjadi pada variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang mendekati 0 menandakan bahwa variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis R^2 untuk menilai seberapa baik variabel independen dapat memprediksi variasi yang terjadi pada variabel dependen, dengan nilai yang mendekati 1 menandakan hubungan yang lebih kuat antara keduanya.

Untuk mengetahui seberapa besar persentasi yang dapat dilakukan variabel bebas terhadap variabel terikat, digunakan rumus koefisien determinan (D) dengan rumus :

$$D = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

D : Koefisien Determinan

r^2 : koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

100% : Persentase kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Penelitian ini mengelompokkan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kategori, yakni variabel independen (bebas) dan variabel terikat. Faktor-faktor independen yang dimasukkan dalam analisis meliputi upah minimum, tingkat pengangguran, dan indeks pembangunan manusia. Sementara itu, variabel terikat yang diamati adalah pertumbuhan ekonomi. Data yang diperlukan untuk analisis ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, mencakup rentang waktu dari tahun 2010 hingga 2023. Pemilihan periode ini dilakukan untuk memastikan data yang relevan dan terkini dalam menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 4.1
Upah Minimum dan PDRB Kota Medan

Tahun	Upah Minimum (Rupiah)	Tingkat Pengangguran	Indek Pembangunan Manusia	PDRB Kota Medan (Milyar Rupiah)
2010	1 410 000	13,11	76,51	96,032
2011	1,439,258	9,97	77,12	98,576
2012	1,624,239	9,03	77,78	105,162
2013	1,777,382	10,01	78,00	110,795
2014	1,600,000	9,48	78,26	117,525
2015	2,037,000	11,00	78,87	124,269
2016	2,271,255	11,15	79,34	184,809
2017	2,528,815	9,46	79,98	203,035
2018	2,749,074	8,25	80,65	222,483
2019	2,969,824	8,53	80,97	241,482
2020	3,222,556	10,74	80,98	242,198
2021	3,329.867	6,33	81,21	254,721
2022	3.370.645	5,47	81,76	263,640
2023	3.624.117	5,24	82,61	267,300

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan, Diolah.

Kenaikan upah minimum di Kota Medan setiap tahunnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperhatikan perlindungan upah bagi pekerja. Data menunjukkan fluktuasi angka pengangguran di Kota Medan, yang terjadi karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Tingkat pengangguran menjadi tolok ukur penting dalam analisis ketenagakerjaan, mengindikasikan seberapa efisien lapangan kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Tingginya tingkat pengangguran berpotensi menjadi akar masalah kemiskinan yang dapat memicu peningkatan kejahatan dan menghambat proses pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja agar dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di Kota Medan (Artriyani, 2013).

Sesuai ketentuan Gubernur Sumut Nomor 188.44/998/KPTS 2023, setiap pekerja/pegawai berhak memperoleh penghasilan yang memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk menghasilkan pendapatan yang memenuhi hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan yang melindungi pekerja/pegawai. Menurut Wijaya (2014:110), salah satu bentuk perlindungan upah yang dilakukan negara adalah dengan penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup yang layak serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam menetapkan upah minimum, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi kebutuhan hidup minimum, stabilitas perusahaan, kondisi pasar tenaga kerja, serta faktor ekonomi termasuk indeks harga konsumen dan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah. Kriteria-kriteria ini menjadi

landasan utama dalam menentukan besaran upah minimum di setiap daerah. Namun demikian, keputusan tersebut haruslah diambil dengan hati-hati, mengingat risiko ketidakseimbangan ekonomi yang mungkin timbul apabila upah minimum naik secara signifikan tanpa disertai peningkatan produktivitas.

Kenaikan upah minimum yang tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja berpotensi menyebabkan masalah serius bagi perusahaan, seperti kebangkrutan karena tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran upah kepada karyawan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada stabilitas perusahaan, tetapi juga bisa berdampak pada pasar tenaga kerja secara keseluruhan. PHK massal akibat kenaikan upah minimum yang tidak seimbang dengan produktivitas akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang dapat memicu lonjakan pengangguran dan kemiskinan.

Pada gilirannya, pelanggaran terhadap peraturan upah minimum, baik disengaja maupun tidak, dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat secara luas. Meskipun demikian, masih banyak pengusaha yang melanggar aturan tersebut, terutama karena pertimbangan ekonomi internal perusahaan seperti keuntungan dan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar agar kebijakan upah minimum dapat dijalankan dengan efektif demi kesejahteraan bersama.

2. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis klasik dilakukan untuk memperoleh hasil analisis yang andal. Berikut ini pengujian untuk mengetahui terpenuhinya kedua asumsi klasik tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk syarat asumsi klasik, yaitu sebagai berikut:

b. Uji Normalitas

Dalam menentukan apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas digunakan 2 cara antara lain sebagai berikut:

1) Kolmogorov Smirnov

Kolmogorov Smirnov memiliki kriteria pengujian sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti data berdistribusi tidak normal.
- b) Jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

		Upah Minimum	Tingkat Pengangguran	IPM	Pertumbuhan Ekonomi
N		13	13	13	13
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.9869	.7908	.3885	.4831
	Std. Deviation	.00947	.11236	.00376	.04837
Most Extreme Differences	Absolute	.229	.205	.505	.214
	Positive	.229	.137	.341	.214
	Negative	-.166	-.205	-.505	-.175
Test Statistic		.229	.205	.505	.214
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061 ^c	.141 ^c	.110 ^c	.104 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

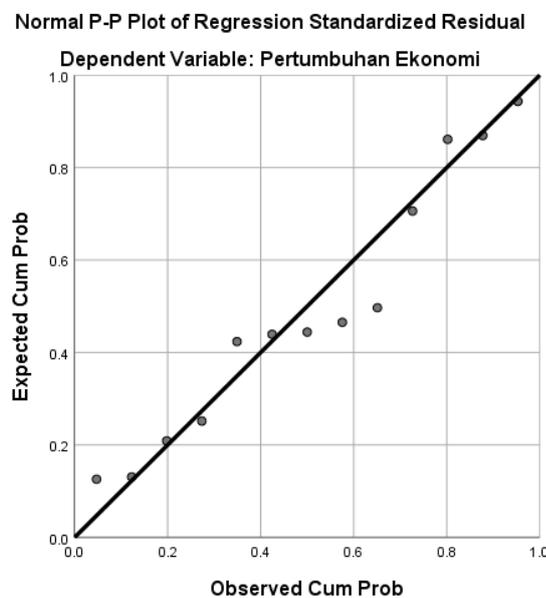
Sumber : Hasil penelitian SPSS 26

Dari tabel 4.2, kita perhatikan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov untuk variabel upah minimum adalah 0,61, sedangkan untuk variabel tingkat pengangguran adalah 0,104. Perlu dicatat bahwa nilai-nilai ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal dengan tingkat kepercayaan

95%. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa distribusi data tidak mengikuti pola normal. Untuk memverifikasi ini, kita dapat melihat visualisasi data seperti p-plot normal dan histogram, yang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang distribusi aktual dari variabel tersebut.

2) P-Plot Regression

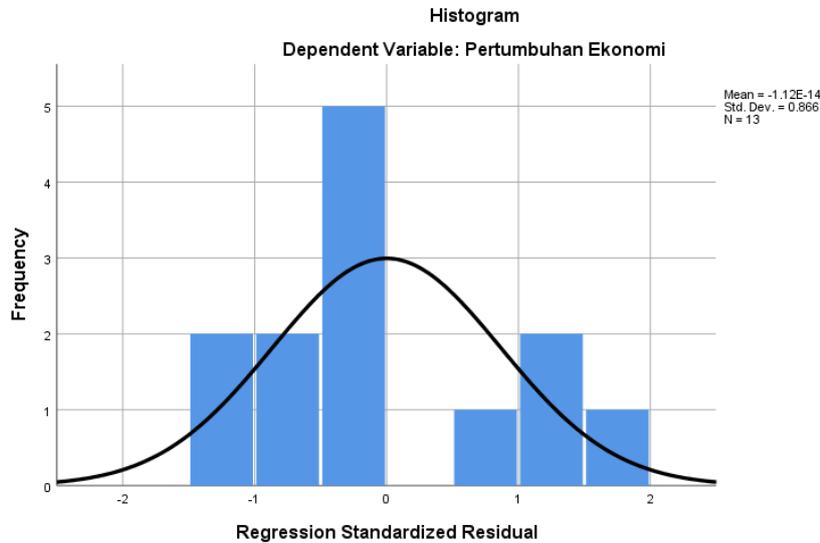
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat (dependent) dan variabel bebas (bebas) dalam suatu model regresi sama-sama berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal dapat dilihat pada p-plot di bawah ini:



Gambar 4.1 Uji Normalitas dari Normal P-P Plot Regression Standardized Residual

Hasil pengaruh normalitas data pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik plot normal tersebar mendekati garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal sehingga dapat digunakan.

Berikut ini dapat dilihat secara grafis histogram hasil penelitian yang diolah menggunakan pengujian SPSS for Windows versi 20 :



Gambar 4.2 Histogram

Berdasarkan grafik 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian menunjukkan pola sebaran normal karena grafik tidak miring ke kiri atau ke kanan.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antara kondisi berikut dengan variabel independen dalam model regresi linier :

- 1) Bila $VIF > 5$ maka terdapat masalah multikolinearitas yang serius.
- 2) Bila $VIF < 5$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1 (Constant)		
Upah Minimum	.438	2.282
Tingkat Pengangguran	.539	1.855
IPM	.688	1.454

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 26

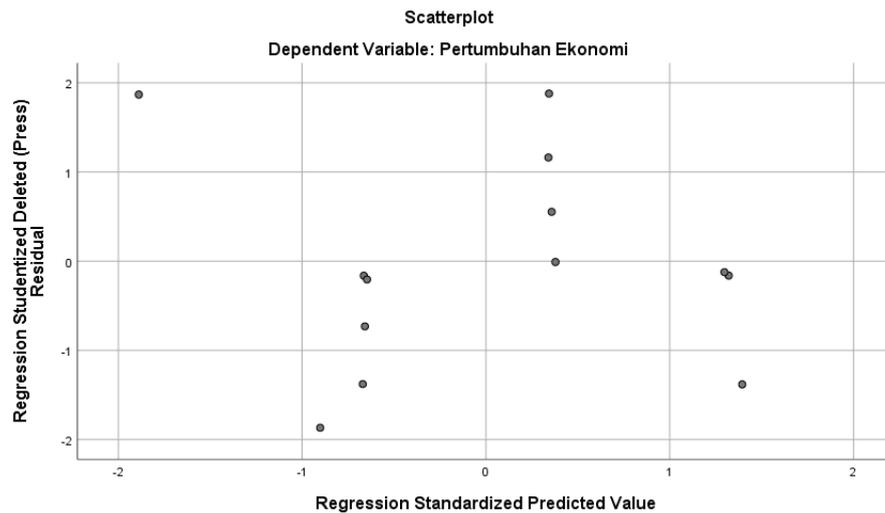
Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa tidak terjadi permasalahan multikolinearitas karena VIF (Variabel Inflasi) kurang dari 5 yaitu VIF upah minimum 2,282 kurang dari 5, tingkat pengangguran VIF 1,855 yaitu lebih sedikit. Kurang dari 5, HDI VIF adalah 1,454 yang kurang dari 5.

4) Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai ketimpangan varians dari sisa-sisa pengamatan yang lain. Analisis menggunakan metode informal dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini. Cara informal untuk menguji heteroskedastisitas adalah metode grafis Scatterplot.

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik yang menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.



Gambar 4.3
Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar IV.3 memperlihatkan bulatan membentuk pola tidak teratur, dimana titik – titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas.

5) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke- t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi dinamakan adanya problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi.

Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W) :

- 1) Jika nilai D-W di bawah -2, maka ada autokorelasi positif
- 2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi
- 3) Jika nilai D-W di atas +2, maka ada autokorelasi negatif.

Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan hasil uji autokorelasi pada data yang telah diolah :

Tabel 4.4**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	DurbinWatson
		F Change	df1	df2		
1	.873	20.710	3	9	.000	1.399

a. Predictors: (Constant), IPM, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 26

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang didapat sebesar 2,140 yang berarti nilai D-W berada di antara -2 sampai +2 ($-2 < 1.399 < +2$) sehingga dapat disimpulkan bahwa dari angka Durbin Watson tersebut tidak ada autokorelasi .

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linier berganda menghubungkan satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas dalam suatu model. Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh jumlah kredit dan dana pihak ketiga terhadap NPL.

Tabel 4.5
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta
	B	Std. Error	
1 (Constant)	4.514	.912	
Upah Minimum	.620	.915	.905
Tingkat Pengangguran	.313	.770	.731
IPM	.799	1.842	.985

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, maka persamaan regresi linear berganda diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = 4,154 + 0,620 X_1 + 0,313 X_2 + 0,799 X_3$$

Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 4,154 dengan arah hubungan positif yang menunjukkan bahwa jika seluruh variabel bebas yaitu upah minimum, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia dalam keadaan konstan maka kredit macet sebagai variabel terikat maka pertumbuhan ekonomi adalah 4.154
- 2) Nilai upah minimum (X_1) sebesar 0,620 dengan arah hubungan positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan upah minimum akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 0,620 dengan asumsi variabel bebas bernilai konstan.
- 3) Nilai tingkat pengangguran (X_2) sebesar 0,313. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa setiap penurunan tingkat pengangguran akan diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,313 dengan asumsi variabel independen bernilai konstan.
- 4) Nilai IPM (X_3) sebesar 0,799. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan IPM akan diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,799 dengan asumsi variabel independen bernilai konstan.

d. Pengujian Hipotesis

1) Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara terpisah. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Setelah t hitung diperoleh, maka dibandingkan dengan t tabel.

Kriteria pengambilan keputusan :

- 1) H_0 diterima jika : $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$
- 2) H_0 ditolak jika : $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$

Untuk uji statistik t penulis menggunakan pengolahan data SPSS *for windows* versi 23 maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4.514	.912		4.950	.001
Upah Minimum	.620	.915	.905	5.052	.001
Tingkat Pengangguran	.313	.770	.731	4.190	.009
IPM	.799	1.842	.985	6.597	.000

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
Sumber : Hasil Penelitian SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai perolehan uji-t untuk hubungan antara Upah Minimum, Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai t_{tabel} untuk $n = 13 - 2 = 11$ adalah 2,160.

1. Pengaruh Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah upah minimum secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pengolahan data SPSS 26, maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut :

$$t_{hitung} = 5,052$$

$$t_{tabel} = 2,160$$

Dari kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $-2,160 \leq t_{hitung} \leq 2,160$ pada $\alpha = 0,05$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} > 2,160$ atau $-t_{hitung} < -2,160$

Berdasarkan hasil uji parsial pengaruh upah minimum sebesar 5,052 dan t tabel sebesar 2,160. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari tabel ($5,052 > 2,160$) dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,001 (Sig 0,001 < 0,05). Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai t-hitung yang merupakan hubungan positif antara upah minimum dengan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,052, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan tren pertumbuhan upah minimum.

2. Pengaruh Tingkat Penggajian terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah tingkat penggajian individu (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji t dapat diperoleh dari Pengolahan Data SPSS 26 sebagai berikut :

$$t_{hitung} = 4,190$$

$$t_{tabel} = 2,160$$

Dari kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $-2,160 \leq t_{hitung} \leq 2,160$ pada $\alpha = 0,05$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} > 2,160$ atau $-t_{hitung} < -2,160$

Berdasarkan hasil uji parsial pengaruh terhadap tingkat pengangguran sebesar 4,190 dan t tabel sebesar 2,160. Dengan demikian, thitung lebih besar dari tabel ($4,190 > 2,160$) dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,009 (Sig 0,009 < 0,05). Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya hubungan positif antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi maka nilai thitung sebesar 4,190 menunjukkan kecenderungan tingkat pengangguran mengikuti pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah indeks pembangunan manusia secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pengolahan data SPSS 26, maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut :

$$t_{hitung} = 6,597$$

$$t_{tabel} = 2,160$$

Dari kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $-2,160 \leq t_{hitung} \leq 2,160$ pada $\alpha = 0,05$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} > 2,160$ atau $-t_{hitung} < -2,160$

Berdasarkan hasil uji parsial pengaruh terhadap IPM sebesar 6,597 dan t tabel sebesar 2,160. Dengan demikian, thitung lebih besar dari tabel ($6,597 > 2,160$) dan mempunyai signifikansi hitung sebesar 0,000 (Sig 0,000 < 0,05). Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan terdapat pengaruh secara parsial IPM terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan hubungan positif antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.597, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengikuti tren peningkatan IPM.

2) Uji F (Simultan)

Uji F juga disebut dengan uji signifikan secara bersama-sama dimasukkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu Upah Minimum, tingkat pengangguran dan IPM dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kriteria pengujian :

Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$

Terima H_0 apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > -F_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 26, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji- F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.025	3	.008	20.710	.000 ^b
	Residual	.004	9	.000		
	Total	.028	13			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), IPM, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 26

Bertujuan untuk menguji hipotesis statistik diatas, maka dilakukan uji F pada tingkat $\alpha = 5\%$. Nilai F hitung untuk $n = 13$ adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = 20,710$$

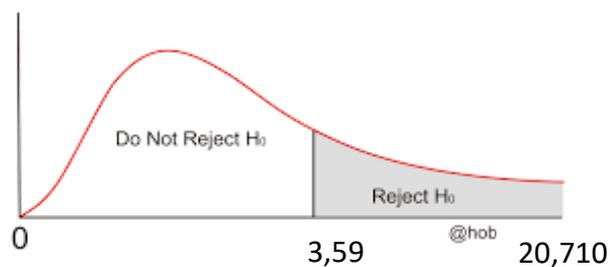
$$F_{tabel} = n-k-1 = 13-3-1 = 9$$

Nilai F_{tabel} untuk $n = 9$ adalah sebesar 3,59. Selanjutnya nilai F_{hitung} sebesar 3,59 digunakan sebagai kriteria pengambilan keputusan.

Kriteria pengujian:

H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > 20,710$ atau $-F_{hitung} < -20,710$

H_a diterima apabila $F_{hitung} < 20,710$ atau $-F_{hitung} > -20,710$



Gambar 4.4

Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F

Berdasarkan hasil uji simultan menggunakan uji F_{hitung} dan F_{tabel} . Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi diperoleh F_{hitung} 20,710 dengan F_{tabel} 3,59 lebih besar dari F_{tabel} ($20,710 > 3,59$) dan mempunyai angka signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai Upah Minimum, Tingkat Pengangguran dan IPM secara bersama-sama, dengan kata lain Upah Minimum, Tingkat Pengangguran dan IPM secara simultan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kota Medan.

4.1.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat seberapa baik seluruh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Jika koefisien

determinasinya lebih kuat berarti variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sementara itu, nilai koefisien determinasi yang kecil (R^2 terkoreksi) berarti variabel independen mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variasi dependen. Di bawah ini adalah hasil uji statistik.

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	DurbinWatson
1	.935 ^a	.873	.831	.01987	.873	20.710	3	9	.000	1.399

a. Predictors: (Constant), IPM, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 26

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas diperoleh nilai R-squared sebesar 0,873. Untuk mempelajari besarnya pengaruh variabel upah minimum, tingkat pengangguran dan IPM secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan dengan uji koefisien determinasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} KD &= R^2 \times 100 \% \\ &= 0,935^2 \times 100 \% \\ &= 87,3\% \end{aligned}$$

Nilai R-squared di atas adalah 87,3% yang berarti 87,3% variasi nilai pertumbuhan ekonomi bermasalah disebabkan oleh perubahan Upah Minimum, tingkat pengangguran, dan IPM yang menyumbang 87,3% variasi pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ditentukan. sisanya sebesar 12,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Analisis hasil penelitian ini merupakan analisis hasil penelitian ini mengenai konsistensi teori umpan balik dan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh hasil penelitian terdahulu, serta pola perilaku yang sebaiknya diterapkan untuk mengatasi hal tersebut. Di bawah ini terdapat 4 (empat) bagian utama yang akan dibahas dalam menganalisis hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji parsial pengaruh upah minimum sebesar 5,052 dan t tabel sebesar 2,160. Dengan demikian thitung lebih besar dari tabel ($5,052 > 2,160$) dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,001 ($\text{Sig } 0,001 < 0,05$). Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya hubungan positif antara upah minimum dengan pertumbuhan ekonomi, nilai sebesar 5,052 t menunjukkan adanya tren peningkatan upah minimum yang diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak kenaikan upah minimum regional terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatnya nilai upah minimum regional maka akan meningkatkan minat masyarakat untuk bekerja dan memulai usaha sehingga produksi di wilayah tersebut meningkat. Hal ini mempunyai kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di kota Medan. Kenaikan upah minimum regional dibarengi dengan kenaikan persentase.

Pertumbuhan ekonomi akan meningkat ketika masyarakat membangun usaha untuk meningkatkan tingkat kreativitas produk. Kebijakan penetapan upah minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertujuan untuk mencapai Penghidupan Layak (DHL) sekaligus menjamin pekerja/buruh mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Program Pencapaian Upah Minimum untuk Hidup Layak (DHL) menunjukkan kemajuan nyata. Artinya kebutuhan hidup akan terpenuhi secara bertahap.

Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menciptakan penghasilan yang layak bagi para pekerja. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain peningkatan kesejahteraan karyawan tanpa meningkatkan produktivitas dan kemajuan perusahaan, serta pertimbangan kondisi perekonomian secara umum (Anggadini, 2015).

Teori penting untuk menjelaskan keadaan ini adalah teori kekakuan upah, yang menyatakan bahwa upah tidak menyesuaikan diri pada titik keseimbangan, atau penawaran sama dengan permintaan tenaga kerja. Di sisi lain, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori pengupahan Simanjuntak (2011) yang menyatakan bahwa peningkatan upah dan pendapatan pekerja akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Berkurangnya tenaga kerja tentu saja akan mempengaruhi volume produksi sehingga memungkinkan produktivitas sektor manufaktur menurun dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Produktivitas merupakan komponen yang cukup penting dalam mengukur kinerja perekonomian. Dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi maka perekonomian daerah akan tumbuh lebih cepat dan stabil (Dinamika et al., 2020).

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Windayana (2020) bahwa variabel UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali. Kenaikan upah minimum menyebabkan kenaikan biaya produksi, sehingga keputusan yang diambil adalah pengurangan tenaga kerja (retrenchment).

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh tingkat pengangguran sebesar 4,190 dan t tabel sebesar 2,160. Dengan demikian, thitung lebih besar dari tabel ($4,190 > 2,160$) dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,009 ($\text{Sig } 0,009 < 0,05$). Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya hubungan positif antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi, nilai t sebesar 5,052 menunjukkan adanya tren peningkatan tingkat pengangguran yang diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis jalur di atas, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memediasi hubungan antara tingkat pengangguran dan kemiskinan di perkotaan.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Rizal dkk (2020) yang berjudul “Dampak Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Aceh” yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran mempunyai pengaruh tidak langsung yang kecil terhadap kemiskinan. pertumbuhan ekonomi. . Perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Padahal bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi Y. A. Rahman & Chamelia, (2015). Hal ini sesuai dengan

pembahasan di atas bahwa tingkat pengangguran juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena tingkat pengangguran di Jawa Timur berfluktuasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur cenderung menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2020.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji parsial pengaruh Indeks Pembangunan Manusia sebesar 6,597 dan t-tabel sebesar 2,160. Dengan demikian, thitung lebih besar dari tabel ($6,597 > 2,160$) dan mempunyai signifikansi hitung sebesar 0,000 (Sig 0,000 < 0,05). Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya hubungan positif antara Indeks Pembangunan Manusia dengan pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai t-hitung sebesar 6,597, hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai tren meningkat dan kemudian pertumbuhan ekonomi meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen utama kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan empat komponen, yakni mencapai umur panjang dan sehat yang mewakili sektor kesehatan, angka melek huruf, sekolah dan pendidikan menengah, serta mengukur kemajuan di bidang pendidikan. sektor dan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dapat dilihat dari besarnya rata-rata pengeluaran per kapita dengan pendekatan pendapatan (Chalid & Yusuf, 2014).

Pertumbuhan ekonomi diamati jika jumlah produksi barang dan jasa perekonomian meningkat. Dalam dunia nyata sangat sulit untuk menghitung jumlah unit barang dan jasa yang diproduksi selama periode tertentu. Kesulitan ini muncul bukan hanya karena sifat barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, namun juga karena ukurannya yang berbeda-beda.

Hasil penelitian (Soejoto, 2021) menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Setiap pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan sebesar 0,19%. Sebaliknya jika indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 19,29%.

4. Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Kota Medan membentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah dan skenario pemulihan ekonomi melalui penyelamatan, pemulihan, dan normalisasi. Pemerintah juga menjelaskan penggunaan dana Kredit Daerah untuk infrastruktur sosial, infrastruktur logistik, perumahan masyarakat berpendapatan rendah, perencanaan kawasan khusus, dan infrastruktur lingkungan. Dengan mensinergikan dan menyinkronkan program pemulihan ekonomi nasional dan daerah, diharapkan pemulihan ekonomi dapat dipercepat sehingga masyarakat dapat kembali meningkatkan tingkat kesejahteraannya dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Medan. Alasan lainnya adalah dengan adanya kenaikan upah minimum setiap tahunnya maka permintaan tenaga kerja di sektor formal akan berkurang sehingga angkatan kerja yang tidak diterima di

sektor formal akan memilih bekerja di sektor informal. Dengan demikian, angkatan kerja tetap bisa mendapatkan pekerjaan meskipun upah yang diperolehnya berada di bawah upah minimum yang telah ditentukan.

(Firdhania et al., 2014.) mengemukakan bahwa peningkatan IPM tentunya akan menurunkan jumlah pengangguran. IPM meningkat yang berarti perkembangan otonomi daerah semakin membaik. Peningkatan IPM saat ini mungkin disebabkan oleh faktor pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan bertambahnya dan terus membaiknya faktor-faktor tersebut, maka kualitas manusia atau masyarakat akan mengalami peningkatan yang relatif baik, sehingga peningkatan kualitas dan keterampilan penduduk akan mengurangi jumlah pengangguran. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas angkatan kerja. Jika pendidikan angkatan kerja rendah maka akan sulit memasuki pasar kerja. Dengan demikian, pendidikan yang merupakan salah satu indikator IPM berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, sehingga pekerja yang berpendidikan rendah akan kesulitan mendapatkan pekerjaan sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran (Nurcholis, 2014).

Tingkat pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan negatif dengan pengangguran. Jika tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, maka tingkat pengangguran pasti akan menurun. Faktanya, seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, maka roda ekonomi yang menggerakannya pun ikut melebar dan output pun meningkat. Di sini peran tenaga kerja semakin dibutuhkan, otomatis jumlahnya akan bertambah, yakni jumlah pengangguran akan berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun (Hukum

Okun) menunjukkan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah tingkat pengangguran dan sebaliknya (Prawira, 2018).

Hasil penelitian (Mahihody, 2018) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan upah minimum secara bersama-sama mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh upah minum, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh upah minum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010-2022
2. Ada pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010-2022
3. Ada pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010-2022
4. Ada pengaruh upah minum, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010-2022

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kota Medan, hendaknya member perhatian Kepada industri besar, sedang dan insutri kecil, rumah tangga. Dengan demikian target pencapaian pertumbuhan ekonomi dan penegntasan pengangguran pengangguran dapat dicapai. Mengingat bahwa sektor industri merupakan

salah satu penopang utama bagi perekonomian di Kota Medan. Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan cara membuat kebijakan berupa penguatan neraca perdagangan dan penguatan permintaan barang/jasa domestik hal ini ditujukan agar pergerakan ekonomi terjaga dengan baik. Penguatan permintaan barang/jasa dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas barang/jasa dengan beberapa inovasi.

2. Pengaruh upah minimum dalam studi ini baru diuji pada dua sektor ekonomi, yakni industri (sektor ekonomi sekunder) dan perdagangan (sektor ekonomi tersier). Akan memberikan gambaran yang lebih luas jika pengaruh upah minimum juga dilihat per sub-sub sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja lebih banyak seperti industri tekstil dan produk tekstil, industri makanan, industri kertas dan industri lainnya. Juga terhadap sektor-sektor lain seperti konstruksi, pertambangan, transportasi, atau jasa keuangan.
3. Pemerintah sebaiknya memperhatikan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dalam permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran terbuka. Karena dalam variabel-variabel tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan mengenai penanggulangan jumlah pengangguran. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.
4. Pembangunan manusia memiliki peran penting dalam proses kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih fokus melakukan pembangunan yang berpihak di bidang manusia untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal untuk mengurangi ketimpangan ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Afrida, (2018), *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agus, Muhamamd. (2016) *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Andi
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Artriyani, S. (2013). Analisis pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Askenazy, Philippe. (2016). Minimum Wage, Export, and Growth. *European Economic Review* 47 (2003), pp 114 – 167.
- Azuar Juliandi. (2014). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Edisi Pertama. Medan: Media Inn,
- Bambang Riyanto, (2013). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: Yayasan Badan. Penerbit Gadjah mada,
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- G. Kartasapoetra, (2018) *Koperasi Indonesia*. Jakarta. :Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardijan Rusli, (2017). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hasibuan, Malayu S.P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi. Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.

- Karim, Adiwarman. 2014. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moekijat, (2013). *Manajemen Kepegawaian Dan Hubungan Dalam Perusahaan*,. Edisi Ketiga, Bandung: Alumni.
- Nanga, Muana. (2017). *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Ninda Novia Charysa (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008- 2011, *Economics Development Analysis Journal* 2 (4). 277-285.
- Prathama Rahardja, Mandala Manurung. (2018). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: LPFEUI.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Putong Iskandar, (2018), *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, Ghalia. Indonesia. JAKARTA: Rahardja, Prathama.
- Rahardjo. (2017). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rivai, Veithzal, (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari Teori Ke Praktik*, Edisi Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.

- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Sadono, (2016). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Sandy, Dharmakusumay. (2018). Trade Off Antara Inflasi Dan Tingkat Pengangguran. *Gema stikubank*. Hal 43-68.
- Setiawan, S. N., Nurwati, N (2020). Dampak COVID-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(01).
- Sinungan, Muchdarsyah. (2016). *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Cetakan ke9. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjafrizal, (2017). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Cetakan Pertama. Padang: Baduose Media.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- SUHENDI, RUSIADI, NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Sumarsono, Sonny. (2014). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Tarigan, R. (2016). *Ekonomi Regional*. Bumi Aksara. Jakarta
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Wijaya, (2014). *Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Grasindo
- Yulia Adella Sari, (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol 10, No 2. h. 121 – 130.